



Parlementaria



3 Tingkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Haji



4 Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Semakin Meluas



DPR Dukung Indonesia Jadi Anggota Penuh OECD



Kaji Ulang Mekanisme Program dan Pembiayaan Tapera



RUU Kelautan Perkuat Keamanan Laut

Nomor 1295/1/VI/2024 Juni 2024



9 772614 339005



RUU Kelautan Perkuat Keamanan Laut

Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Kelautan DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Bakamla RI di Batam, Kepulauan Riau. Kunjungan Kerja tersebut untuk mendengarkan dan mendapatkan masukan dari Bakamla beserta jajarannya terkait dengan sistem keamanan laut.

Diketahui, RUU tentang Kelautan, secara umum, akan mengatur tentang laut dan kelautan secara lebih komprehensif guna mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia; serta secara khusus membahas mengenai permasalahan kelembagaan yang menyelenggarakan keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum di laut.

Terkait hal itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan DPR RI Christina Aryani meninjau langsung Armada Kapal milik Bakamla RI KN. Tanjung Datu dan menyaksikan langsung pertunjukan kekuatan (*show of force*) simulasi operasi bertema "Visit, Board, Search and Seizure (VBSS)". Operasi ini dilakukan untuk tindakan pernyergapan, pemeriksaan, penggeledahan, dan



FOTO: MRI/AHA

Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan DPR RI Christina Aryani beserta tim.

penguasaan kapal sasaran di laut dikarenakan tingkat eskalasi yang sudah membahayakan.

Adapun dalam RUU Kelautan ini terdapat dua pokok pembahasan utama, yaitu menjaga kedaulatan, dan bagaimana hasil dari laut ini digunakan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk rakyat. "Kami

menyaksikan langsung operasinya dilakukan dan melihat persenjataan yang dimiliki oleh kapal-kapal ini. Tadi juga sempat rapat dengan Bakamla untuk mendengar bagaimana situasi keamanan maritim 2024 dan proyeksi serta tantangan ke depannya," jelas Christina usai memimpin pertemuan dengan Ba-kamla di KN. Tanjung Datu Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/5).

Dalam Kesempatan ini juga, Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Kelautan mengunjungi pangkalan Bakamla, Pusat Pendidikan, dan Mako Zona Barat Bakamla. Tim Pansus ingin mengetahui secara khusus tugas dan fungsi Pangkalan Bakamla Batam serta Fasilitas dan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang berada di Pangkalan Bakamla Batam. [mri/rdn](#)



Tingkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Haji



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

FOTO: GO/AHA

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2024 menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Gus Muhaimin, sapaan akrabnya menyampaikan beberapa poin krusial terkait pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Muhaimin menggarisbawahi bahwa setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi perhatian utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal.

“Tentu setiap tahun pelaksanaan penyelenggaraan Haji ini bisa lebih baik, dari evaluasi transportasi dan lokasi tenda, kita harapkan lebih mendekat pada tahun ini dan nanti tahun ini juga akan menjadi perhatian kita,” ujar Gus Muhaimin, usai memimpin perdana Rapat Koordinasi Tim Pengawas Haji DPR RI di Jakarta, Selasa (28/5).

Salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah baru yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Muhaimin menekankan pentingnya pemanfaatan kuota tambahan ini dengan sungguh-sungguh dan transparan. **skr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,

Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,

Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,

Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu

Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto,

Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti

Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,

Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,

Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,

Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,

Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal DWi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Khairina Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Puan Harap Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Semakin Meluas



FOTO: IST/ANHA

Ketua DPR RI bersama Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT.

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan National People's Congress/NPC (Kongres Rakyat Nasional) Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ia bertemu dengan Zhao Leji yang menjabat sebagai Ketua Parlemen RRT di kompleks Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok yang terletak di tepi lapangan Tiananmen, Beijing, Selasa (28/5).

"Saya ucapkan terima kasih atas undangan dan fasilitas NPC pada kunjungan saya ini. Saya berharap

kunjungan saya ini dapat membuka peluang guna memperluas dan memperdalam kerja sama antara Indonesia dan RRT," kata Puan dalam pertemuan tersebut.

Puan pun menyinggung persahabatan Indonesia dan Tiongkok yang telah berlangsung sejak lama di mana hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 1950. Tahun 2025 nanti, Indonesia dan RRT akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang dinilai akan memasuki babak baru perkembangan hubungan kedua negara.

"Marilah kita manfaatkan

peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di tahun 2025 untuk terus mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan," ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi strategis. Termasuk kerja sama untuk pemulihan ekonomi serta implementasi kerja sama bilateral konkret RI-RRT, seperti pada Rencana Aksi Kemitraan Strategis RI-RRT 2022-2026. "Saya mendukung Rencana Aksi untuk meningkatkan kerja sama politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat, dan proyek maritim," imbuhnya **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Dukung Indonesia Jadi Anggota Penuh OECD

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menerima kunjungan Sekretaris Jenderal *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Mathias Cormann, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5). Diketahui, Indonesia telah masuk dalam daftar aksesori OECD dan menargetkan untuk menjadi anggota penuh pada tiga tahun ke depan.

“Kami baru saja menerima delegasi dari OECD, organisasi pembangunan dan pengembangan ekonomi yang saat beranggotakan 38 negara. Indonesia telah mendaftarkan, istilahnya sudah ada akses, untuk masuk menjadi anggota OECD. Untuk menjadi anggota dari OECD sebenarnya membutuhkan (persiapan) tujuh tahun tetapi dari upaya pemerintah *alhamdulillah* kita bisa *fix* (bakal) menjadi anggota (OECD) itu untuk katakan tiga tahun ke depan,” tutur Lodewijk saat ditemui **Parlementaria** usai pertemuan tersebut.



FOTO: HAN/AHA

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OECD.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun tersebut masih ada beberapa hal yang harus dikejar, termasuk penerapan aturan-aturan yang sesuai dengan standar OECD. Lodewijk juga menyinggung UU Cipta Kerja ikut andil sebagai batu loncatan akselerasi keanggotaan Indonesia di OECD.

“Kita kan sudah ada loncatan, katakan dengan (disahkannya) Undang-Undang Cipta Kerja tetapi itu pun nanti kita lihat karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh pelabuhan kapal, dia bongkar nunggu berapa lama? ada standarnya *nggak* boleh lama-lama kan mereka namanya suatu organisasi tentunya punya aturan-aturan,” jelas Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Menutup pernyataannya Lodewijk menyampaikan bahwa berbagai potensi terbuka lebar saat Indonesia menjadi anggota penuh dari OECD. Besar kemungkinan terjalannya berbagai kerja sama antar anggota-anggota OECD termasuk kerja sama ekonomi dan ekspor-impor.

uc/rdn



BERBAGAI POTENSI TERBUKA LEBAR SAAT INDONESIA MENJADI ANGGOTA PENUH DARI OECD. BESAR KEMUNGKINAN TERJALINYA BERBAGAI KERJA SAMA ANTARANGGOTA-ANGGOTA OECD TERMASUK KERJA SAMA EKONOMI DAN EKSPOR-IMPOR.

Lodewijk F. Paulus

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Revisi UU Polri Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri yang tengah digodok di DPR. Dasco menjelaskan, DPR sebelumnya telah melakukan revisi Undang-undang Kejaksaan pada 2021.

Ia mengatakan, revisi itu salah satunya mengubah usia pensiun dan usia jabatan fungsional jaksa. Usai revisi UU Kejaksaan itu, kata Dasco, ada permintaan untuk menyamakan revisi UU Kepolisian dan UU TNI dengan UU Kejaksaan.

"Ada permintaan untuk melakukan revisi Undang-undang Polri dan TNI agar dapat sama dengan Undang-undang Kejaksaan tentang masa pensiun dan masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Gerindra

itu juga menjelaskan, revisi UU Kepolisian dan UU TNI sempat tertunda karena pelaksanaan Pemilu 2024. Karena itu, usai Pemilu, DPR bakal menuntaskan revisi UU Kepolisian dan UU TNI ini.

"Nah sekarang itu supaya juga semua sama di antara para penegak hukum ini, kita kemudian melakukan juga revisi," kata Legislator Dapil Banten III ini.

Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR dari Fraksi PAN, Guspari Gaus, sebelumnya mengkonfirmasi ihwal pembahasan revisi UU Kepolisian di DPR. Guspari mengatakan, saat ini tenaga ahli di Baleg tengah melakukan kajian mengenai isu apa saja yang akan diakomodasi dalam revisi UU Kepolisian.

we/aha



ADA PERMINTAAN UNTUK MELAKUKAN REVISI UNDANG-UNDANG POLRI DAN TNI AGAR DAPAT SAMA DENGAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN TENTANG MASA PENSIUN DAN MASA BERAKHIRNYA JABATAN FUNGSIONAL.



Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kebijakan Buka-Tutup Impor Berikan Ketidakpastian Investasi di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Rachmat Gobel mempertanyakan kebijakan buka tutup impor yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ketidakpastian pada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

“Hal ini sebetulnya sudah menjadi catatan investor sejak lama, karena aturan sering berubah-ubah, padahal Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong peningkatan investasi dan mendorong ekspor,” kata Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/5).

Belum lama ini pemerintah diketahui melakukan pengetatan aturan impor melalui Permendag No. 7/2024 yang ditandatangani pada 10 Maret 2024 dan mulai berlaku 6 Mei 2024. Permendag itu merupakan perubahan kedua atas Permendag No. 36/2023 yang direvisi melalui Permendag No. 3/2024. Permendag No. 7/2024 merupakan regulasi yang memperketat persyaratan impor yang harus menyertakan pertimbangan teknis (Pertek).



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

Pengetatan tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan melindungi investasi di Indonesia. Namun pada Jumat 17 Mei 2024, pemerintah merevisi aturan itu melalui Permendag No. 8/2024 yang menghapus persyaratan Pertek untuk sejumlah barang seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas,

dan katup. Permendag tersebut langsung berlaku pada hari itu juga.

Alasan revisi tersebut, diketahui karena terjadi penumpukan barang sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sehingga Permendag yang baru diharapkan dapat menjadi solusi dari penumpukan barang yang harus bisa diselesaikan dalam waktu lima hari.

Lebih lanjut, Gobel mengingatkan bahwa dunia sedang dihadapkan pada ketidakpastian akibat geopolitik dan persaingan yang ketat antar-negara dalam menarik investor. Sehingga, jangan sampai kebijakan buka-tutup impor tersebut menambah ketidakpastian investor.

bia/rdn

HAL INI SEBETULNYA SUDAH MENJADI CATATAN INVESTOR SEJAK LAMA, KARENA ATURAN SERING BERUBAH-UBAH, PADAHAL INDONESIA SEDANG GENCAR-GENCARNYA MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN MENDORONG EKSPOR.

Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bangun Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Korsel Lebih Intensif

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyebut bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk lebih intensif membangun kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), khususnya di bidang industri pertahanan. Sebab, ia menilai, Korea Selatan merupakan salah satu negara penting yang berperan dalam geopolitik di kawasan Asia.

"Kunjungan kali ini ingin mempererat industri pertahanan, kemudian mempertanyakan komitmen dan ingin berkomunikasi lebih dalam tentang sejauh mana komitmen kedua negara untuk melanjutkan industri tersebut," ujar Nurul ketika ditemui **Parlementaria** usai

melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi Intelijen Parlemen Korea Selatan (*Member of Intelligence Commission of National Assembly Republic of Korea*) Lee In-Young di Ruang Delegasi Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/5)

Sebelumnya, ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPR RI membahas beberapa hal dalam pertemuan itu terkait pertahanan, seperti industri pertahanan, alutsista, maupun kerja sama pertahanan. Ia melanjutkan, selain pernah membangun hubungan kerja sama yang baik pada tahun 2013 lalu, ia menilai Korea Selatan memiliki kerja sama yang baik pula di bidang pertahanan.

"Ini secara komplit dorongan

dari komisi I supaya bisa kembali melanjutkan ini, tetap terjadi dengan Korea Selatan," lanjutnya.

Selain itu, dalam kesempatan itu dibahas pula mengenai kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang bisa diteruskan. "Jadi kita belum tahu nanti bagaimana. Yang jelas ini akan kita sampaikan juga di Rapat Komisi I begitu. Karena memang beberapa kali juga sudah muncul persoalan kerja sama industri pertahanan tersebut," ungkapnya.

Maka dari itu, ia mengungkapkan hasil dari pertemuan ini akan disampaikan di Rapat komisi I. Apalagi, menurutnya memang sudah beberapa kali muncul persoalan kerja sama industri pertahanan tersebut.

— hal/rdn



FOTO: RUN/AHA

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin, dalam foto bersama usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi Intelijen Parlemen Korea Selatan. FOTO: RUN/AHA



Scan QR untuk berita selengkapnya

Apresiasi Aksi Massa Jurnalis Tolak RUU Penyiaran

Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5) siang. Massa aksi tersebut diketahui tergabung dari beberapa aliansi jurnalis dan serikat pekerja media. Di tengah aksi massa tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi aksi jurnalis tersebut.

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” kata Farhan yang langsung menghampiri dan berada di tengah-tengah jurnalis, di depan Gedung DPR/MPR, RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Dalam kesempatan itu, ia menilai revisi UU Penyiaran bisa jadi pintu masuk bagi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebebasan pers.



FOTO: MUN/AHA

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan saat menemui massa.

Oleh karena itu, Farhan bertekad bakal mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran itu. Adapun revisi UU Penyiaran ini sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Lebih lanjut, Farhan mengaku setuju dengan poin-poin yang disuarakan para jurnalis.

“Kita sedang memperjuangkan

bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat nggak masuk. Saat ini prosesnya masih di Badan Legislasi, yang akan menentukan apakah boleh dibahas di periode sekarang, yang akan berakhir Agustus, atau dilanjutkan di DPR periode mendatang,” katanya.

Diketahui pada aksi ini, terdapat tiga tuntutan yang disuarakan jurnalis. Tuntutan tersebut yaitu pertama, batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Kedua, Libatkan partisipasi Dewan Pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi secara aktif dan bermakna dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Ketiga, pastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan. **hal/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnyanya



DPR Terima Audiensi Forum Peduli Tanah DIY

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menerima audiensi dari Forum Peduli Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk NKRI terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diperpanjang. Dalam pertemuan ini, Riyanta berharap semua pihak terkait termasuk Kanwil BPN Yogyakarta dan Gubernur Yogyakarta bisa duduk bersama masyarakat, sehingga bisa menyelesaikan masalah pertanahan yang sudah melarut di DIY ini.

"Saya sarankan kepada warga yang memegang HGB ini untuk bisa melakukan audiensi dengan DPR Komisi II, nanti dengan pemerintah yang dalam hal ini presiden akan diwakili oleh KSP, sama Kementerian ATR BPN dan warga, plus Gubernur DI Yogyakarta. Jadi saran saya agar semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan prinsip dasar negara hukum," kata Riyanta usai audiensi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).



Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menerima audiensi.

Dijelaskan Riyanta, permasalahan dimulai lantaran BPN mengindikasikan tanah para warga pemegang SHGB ini merupakan tanah milik kesultanan. Padahal dalam audiensi dijelaskan, tanah tersebut berstatus milik negara.

Untuk itu, menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, negara

harusnya kembali pada perdoman dan prinsip dasar negara hukum. "Kemudian juga kembali kepada pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi tentu kalau di dalam satu praktik penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa aturan yang saling bertentangan, ini kembali pada perundang-undang yang bersifat khusus," sambungnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Tengah III ini berharap para pemegang SHGB ini bisa dilayani oleh negara, tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip aturan yang ada. "Jadi tanah-tanah yang selama ini sudah diakui oleh negara dengan diberikan SHGB, kemudian ini jatuh tempo, diperpanjang ya otomatis pemegang hak ini diistimewakan, didahulukan, diutamakan," ujarnya. **we/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Bawaslu Perlu Perluas Objek Pengawasannya

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan menilai perlu adanya opsi perluasan objek yang diawasi oleh Bawaslu dalam fungsi tugasnya mengawasi pemilu. Hal ini dikatakan Ongku, mengingat banyaknya pelanggaran pemilu yang tidak bisa ditindak karena pelanggar pemilu tidak masuk dalam objek yang diawasi pemilu.

"Kalau saya mencermati ini, seolah-olah saya lihat objek yang diawasi itu hanya terbatas kepada KPU, kemudian peserta Pilkada, dan mungkin timnya. Nah, saya tidak menemukan adanya objek yang diawasi itu, misalnya, PJ Pejabat Daerah, atau ASN yang terlibat, atau bahkan orang-orang yang disamarkan seolah-olah bukan tim (kampanye). Karena seringkali Bawaslu atau Panwas mengatakan bahwa, 'oh mereka bukan tim Pak, sepanjang mereka bukan tim yang terdaftar, ya kami tidak bisa menindak apa-apa'," kata Ongku dalam RDP Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).



FOTO: AFR/AHA

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan.

Dijelaskan Ongku, dalam Pemilu legislatif 2024 lalu, menurutnya, banyak sekali para pelanggar pemilu yang memanfaatkan celah ini, sehingga bisa terhindar dari sanksi Bawaslu.

"Saya kira karena memang

banyak peserta pemilu atau pilkada itu yang mempunyai tim bayangan atau simpatisan yang tidak ada SK-nya, tidak terdaftar sebagai tim, tidak didaftarkan sebagai tim. Sehingga kalau mereka berbuat sesuatu atas nama caleg atau calon kepala daerah tersebut, mereka tidak bisa ditindak. Nanti Panwas dan Bawaslu akan berkilah bahwa, oh mereka tidak termasuk objek yang diawasi, padahal ini yang banyak sekali dimanfaatkan," terangnya.

Sehingga Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap adanya opsi ditambahkannya objek yang diawasi Pemilu. Sehingga dengan demikian, para pelanggar Pemilu bisa dengan mudah disanksi dan memberikan efek jera untuk para pelanggar. [we/rdn](#)



KALAU SAYA MENCERMATI INI, SEOLAH-OLAH SAYA LIHAT OBJEK YANG DIAWASI ITU HANYA TERBATAS KEPADA KPU, KEMUDIAN PESERTA PILKADA, DAN MUNGKIN TIMNYA.

Ongku P. Hasibuan.

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



SYARAT PESERTA, BESARAN IURAN & PENCAIRAN DANA TAPERA



SYARAT

- Peserta Tabungan Perumahan Rakyat/Tapera: Pekerja & Pekerja Mandiri Berpenghasilan Paling Sedikit Sebesar Upah Minimum
- Berusia Minimal 20 Tahun atau Sudah Menikah Saat Pendaftaran

BESARAN IURAN

- Pekerja 3% dari Gaji/Upah/Penghasilan dengan Komposisi Pemberi Kerja 0,5% & Pekerja 2,5%
- Pekerja Mandiri Ditanggung Sendiri Sebesar 3%

PENCAIRAN

Para Peserta Akan Dapat Manfaat Tabungan Serta Hasil Pemupukannya, Bisa diambil Saat Masa Kepesertaan Berakhir/Pensiun, Pekerja Mandiri Capai 58 Tahun, Peserta Meninggal Dunia & Peserta Tak Lagi Penuhi Kriteria 5 Tahun Berturut-turut



MANFAAT

Semua Peserta Tergolong Berpenghasilan Rendah & Penuhi Syarat Kelayakan Berhak Dapatkan Manfaat Pembiayaan Perumahan: Kredit Pemilikan Rumah/ KPR, Kredit Bangun Rumah/KBR, Kredit Renovasi Rumah/KRR

Sumber : *Liputan 6



PP Tapera menjelaskan lebih detail terkait pengelolaan dana simpanan, manfaat yang diperoleh dari simpanan dan kapan simpanan itu bisa dirasakan oleh rakyat

HERMAN KHAERON
Anggota Komisi V DPR RI



Tapera Diatur via Peraturan Pemerintah/PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera & Berlaku Mulai 2027

Upayakan Penyelesaian Sengketa Lahan antara PT. SKB dengan PT. GPU

Komisi III DPR RI mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh tersebut, Komisi III berharap konflik lahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada permasalahan yang berlarut-larut di kemudian hari.

Pangeran mengungkapkan, penyerobotan lahan oleh PT Gorby bukan hanya sekarang saja. Dia menyampaikan, permasalahan tersebut berawal dari tahun 2012, 2018, 2023, dan puncaknya sekarang 2024. "Bahkan dari laporan ini, PT SKB telah melaporkan ke Polda Sumatera Selatan sebanyak 10 kali dengan hasil delapan laporan masih tahap penyelidikan. Melaporkan ke Bareskrim dua kali dengan hasil satu laporan masih tahap



FOTO: JIKAHA

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan suasana RDPU.

penyelidikan sejak 2013," papar Pangeran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, konflik lahan di banyak tempat, di Indonesia

semakin naik angkanya terutama di Sumatera Selatan. Dia pun berharap, konflik lahan di beberapa tempat bisa diselesaikan.

"Saya berharap ini bisa ditindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Dr. Supriansa, harus di-clear-kan, bila perlu mengundang Bareskrim ke Komisi III untuk mendengarkan duduk persoalan yang terjadi di sana. Kami berharap ini bisa segera ditindaklanjuti agar konflik lahan di sana bisa kita selesaikan," jelas Nasir.

Seperti yang dilaporkan masalah ini muncul pada tahun 2013 dan 2014 ketika Kabupaten Musi Rawas dipecah menjadi Musi Rawas Utara, yang berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, setelah UU No. 16 Tahun 2013 keluar. Wilayah PT SKB dikurangi sekitar 1.750 hektar sebagai akibat dari Permendagri No. 76 Tahun 2014, yang keluar tidak lama kemudian.

ssb/rdn



SAYA BERHARAP INI BISA DITINDAKLANJUTI SEPERTI YANG DISAMPAIKAN OLEH DR. SUPRIANSA, HARUS DI-CLEAR-KAN, BILA PERLU MENGUNDANG BARESKRIM KE KOMISI III UNTUK MENDENGARKAN DUDUK PERSOALAN YANG TERJADI DI SANA. KAMI BERHARAP INI BISA SEGERA DITINDAKLANJUTI AGAR KONFLIK LAHAN DI SANA BISA KITA SELESAIKAN.

Pangeran Khairul Saleh

Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kunjungi BBPSI Biogen, Komisi IV Bahas Ketahanan Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengatakan pentingnya peranan Bank Genetik untuk konservasi dan pemanfaatan Sumber Data Genetik (SDG). Menurutnya, jika tidak ingin kehilangan kedaulatan pangan, varietas genetik yang sudah berkembang di masyarakat harus di jaga dan dimanfaatkan ketika diperlukan.

“Bank genetik itu sangat penting. Tapi sayangnya selama ini tidak tersosialisaikan dengan baik. Terlebih jika kita tidak amankan veritas genetik yang sudah berkembang di masyarakat, kita akan kehilangan kedaulatan pangan kita,” jelas Endang usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, (21/5).

Upaya perlindungan dan pengelolaan SDG dalam hal ini memang memiliki peran yang sangat penting, utamanya dalam menjaga kedaulatan pangan di tengah ancaman perubahan iklim



Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari dan tim.

dan ancaman geopolitik global. Diantaranya yakni melalui Bank Genetik/Bank Benih.

“Bank Genetik ini seharusnya dapat dikembangkan lebih luas lagi bahkan bisa menjadi pusat

pengembangan varietas unggul baru dan sumber perlindungan Sumber Daya Genetik Nasional dalam rangka menjaga ketahanan nasional,” tutur Endang.

Karena itu, melalui kunjungan kali ini, Komisi IV juga menemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Genetik, diantaranya yakni belum adanya payung hukum atau Undang-Undang yang mengatur dalam perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Genetik secara nasional.

“Kami Komisi IV akan terus mendukung dan mendorong adanya Undang-Undang tentang SDG yang akan mengatur mengenai perlindungan serta pengelolaannya secara menyeluruh,” ucap Endang.



BANK GENETIK ITU SANGAT PENTING. TAPI SAYANGNYA SELAMA INI TIDAK TERSOSIALISAIKAN DENGAN BAIK. TERLEBIH JIKA KITA TIDAK AMANKAN VERITAS GENETIK YANG SUDAH BERKEMBANG DI MASYARAKAT, KITA AKAN KEHILANGAN KEDAULATAN PANGAN KITA.

Endang Setyawati Thohari

Anggota Komisi IV DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Akibat Pemerintah Tak Kontrol Kawasan Hutan Lindung

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyampaikan bela-sungkawa atas korban tewas akibat bencana galodo (banjir bandang) yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ia berpendapat, bencana alam yang terjadi tersebut akibat Pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.

“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto dalam keterangan rilis yang diterima Parlemen, di Jakarta, Jumat (17/5). Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galodo yang terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan dan bangunan liar.

“Bencana galodo yang terjadi



FOTO: OJJAHA

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.

di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. Atas

berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.

“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi”, pungkask Legislator Dapil Sumbar I itu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, jumlah korban bertambah setelah tim gabungan pencarian menemukan jenazah warga di sejumlah titik di lokasi terdampak. [gal/rdn](#)

TEGAKKAN ATURAN DAN LAKUKAN TINDAKAN TEGAS PADA PELAKU YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MEMBANGUN, MERAMBAH HUTAN, MENAMBAH DAN BERKEBUN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN KONSERVASI.

Hermanto
Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Transportasi Laut Mampu Tekan Biaya Logistik

Sejak tahun 2015, pemerintah telah memperkenalkan program tol laut dalam rangka mendukung angkutan logistik ke daerah 3T (Tertinggal Terluar dan Terbelakang) di Indonesia sebagai negara maritim dengan 70% lautan dan memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Diharapkan dengan adanya tol laut, pendistribusian barang bisa jadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil sehingga perlahan harga bahan pokok bisa diseragamkan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan akan terus memberikan dukungan secara khusus di wilayah anggaran terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar infrastruktur dapat mendukung logistik transportasi laut lebih optimal, supaya menekan biaya logistik lebih rendah.

"Selama 4 tahun terakhir, Komisi V bersama Kemenhub telah



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat mengisi Seminar Nasional.

menyepakati sejumlah anggaran termasuk angkutan logistik dengan total anggaran kurang lebih Rp130,3 triliun. Dari tahun 2021 ke tahun 2024, total APBN

yang kita alokasikan untuk Ditjen Perhubungan Laut kurang lebih hampir Rp38 triliun," ujarnya saat mengisi Seminar Nasional 'Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045' di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Dengan demikian, diharapkan melalui dukungan anggaran tersebut dapat semakin menunjang logistik untuk dapat lebih menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Tak hanya itu, Komisi V DPR kini juga tengah mendorong Ditjen Perhubungan laut untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau ataupun di kota-kota tertentu. Apalagi, mengingat saat ini jalur darat sedang diperhadapkan dengan masalah *Over Dimension Over Load*. **pun/aha**



KOMISI V DPR KINI JUGA TENGAH MENDORONG DITJEN PERHUBUNGAN LAUT UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN-PELABUHAN DI PULAU-PULAU ATAUPUN DI KOTA-KOTA TERTENTU. APALAGI, MENGINGAT SAAT INI JALUR DARAT SEDANG DIPERHADAPKAN DENGAN MASALAH OVER DIMENSION OVER LOAD.

Andi Iwan Darmawan Aras
Wakil Ketua Komisi V DPR RI



Kaji Ulang Mekanisme Program dan Pembiayaan Tapera



FOTO: MR/HAHA

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat menjadi narasumber diskusi Dialektika Demokrasi.

Niat Pemerintah agar hak kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia terpenuhi melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang

perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diterbitkan pada 20 Mei 2024 silam.

Namun demikian, program ternyata menuai reaksi keras dari publik oleh karena jumlah iuran dan mekanisme yang dianggap

memberatkan. Maka, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai Pemerintah harus mengkaji ulang tata cara program Tapera itu.

"Ini harus dibicarakan ulang. Harus disediakan pada porsi yang tepat sehingga betul-betul masyarakat bisa (mendapatkan) rumahnya, tapi pada sisi lain tidak diberatkan dengan program Pemerintah yang sesungguhnya ini punya tujuan yang baik," ujarnya saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Menelisik Untung Rugi Tapera" di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan pihaknya akan terus menampung, mendengar serta terus menginventarisasi terhadap seluruh usulan masyarakat dan aspirasi yang berkembang di publik, baik langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Sehingga, pada akhirnya, pihaknya juga ingin melihat sejauh mana sesungguhnya keefektifan dari Peraturan Pemerintah ini.

"Langkah terbaik adalah Pemerintah meninjau ulang dan kemudian meriviu mana yang diberatkan, mana yang harus memberikan rasa keadilan, mana pula yang tentu ini harus menjadi mandatoris. Dan ya sebaik-baiknya program Pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, ya tentu semestinya berbasiskan APBN, sebaik-baiknya," tegas Herman Khaeron. pun/aha

LANGKAH TERBAIK ADALAH PEMERINTAH MENINJAU ULANG DAN KEMUDIAN MERIVIU MANA YANG DIBERATKAN, MANA YANG HARUS MEMBERIKAN RASA KEADILAN, MANA PULA YANG TENTU INI HARUS MENJADI MANDATORIS.

Herman Khaeron

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Scan QR untuk ke YOUTUBE selengkapnya.



Starlink Beroperasi, Aspek Kedaulatan Disoroti

su keamanan data dan kedaulatan digital mulai berhembus di berbagai media massa, terlebih Starlink sudah resmi beroperasi di Indonesia sejak April 2024 atau lima tahun setelah beredar melayani pasar global. Peresmian layanan Starlink yang digelar di salah satu puskesmas di Denpasar, Bali, dan dihadiri langsung oleh Elon Musk menjadi penegasan dimulainya persaingan Starlink dengan penyedia jasa internet dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino ikut menyoroti soal kedaulatan data dalam negeri. Dia mempertanyakan kepada Dirut PT. Telkom tentang ancaman kedaulatan data yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. "Beberapa pihak menyatakan bahwa Starlink langsung mentransmisikan datanya ke *cloud*-nya milik Elon Musk, apakah ini benar? apakah mereka tidak menggunakan gateway ke Indonesia dulu?" tanya Politisi F-PDI Perjuangan di ruang rapat Komisi VI, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Dalam industri digital data merupakan hal yang sangat penting sekaligus rentan untuk disalahgunakan, mulai dari



Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino.

diperjualbelikan hingga menjadi senjata dalam perang siber antarnegara. Masalah inilah yang menerpa Elon Musk dan Starlink dalam pusaran perang Rusia-Ukraina sejak 2022. Peristiwa ini bermula pada Februari 2022 atau dua bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika Ukraina meminta Starlink mengaktifkan layanan internet

di negara tersebut menggantikan Viasat karena situasi perang.

Untuk konteks Indonesia, konsep kedaulatan digital sudah tertuang dalam sejumlah aturan, seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

"Padahal kan kita mensyaratkan kedaulatan data ada di Indonesia. Nah, kami minta dari Telkom bisa mengelaborasi ini lebih lanjut, sehingga kami di Komisi VI, bisa juga ikut membantu Telkom demi kepentingan Indonesia," papar Harris Turino. **ssb/rdn**



BEBERAPA PIHAK MENYATAKAN BAHWA STARLINK LANGSUNG MENTRANSMISIKAN DATANYA KE *CLOUD*-NYA MILIK ELON MUSK, APAKAH INI BENAR? APAKAH MEREKA TIDAK MENGGUNAKAN *GATEWAY* KE INDONESIA DULU?

Harris Turino

Anggota Komisi VI DPR RI



Kolaps Jika Subsidi Energi Bengkok dan Dolar Menguat

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, memperkirakan perekonomian Indonesia terancam kolaps, imbas bengkoknya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan perkasanya dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, upaya transisi energi ke energi hijau yang digaungkan pemerintah, masih 'jalan di tempat'.

"Diperkirakan kita akan kolaps, mohon maaf, kalau sampai *crude oil* (minyak mentah) mendekati 95 dolar AS. Apalagi kalau dolar AS lantasi tembus, katakanlah Rp17 ribu, yang membuat angka subsidi meledak sebagaimana 2022 lalu," ujar Sugeng dalam diskusi daring 'Proyeksi Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2024' yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (30/5).

Diketahui, *Indonesia Crude Oil Price* (IIPC) merupakan harga jual minyak mentah di Indonesia secara rata-rata pada Januari sampai



FOTO: OJ/ANA

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

dengan Mei 2024 berada di kisaran 81,52 dolar per barel. Sementara

berdasarkan APBN 2024, ICP tahun ini ditargetkan sebesar 82 dolar AS per barel.

Pemerintah sempat khawatir, pada April 2024 angka ICP secara rata-rata mencapai 87,61 dolar per barel, mengalami kenaikan 3,83 dolar per barel dari ICP Maret sebesar 83,78 dolar per barel. Lonjakan ini akibat ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah menembus Rp16.200 per dolar. Angka ini di atas asumsi makro sejumlah ekonom sebesar Rp15.500 per dolar, bahkan jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang dipatok sebesar Rp15.000 per dolar.

rdn



DIPERKIRAKAN KITA AKAN KOLAPS, MOHON MAAF, KALAU SAMPAI *CRUDE OIL* (MINYAK MENTAH) MENDEKATI 95 DOLAR AS. APALAGI KALAU DOLAR AS LANTAS TEMBUS, KATAKANLAH RP17 RIBU, YANG MEMBUAT ANGKA SUBSIDI MELEDAK SEBAGAIMANA 2022 LALU.



Sugeng Suparwoto

Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terima Audiensi Nakes Honorer

Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota pengangkatan menjadi ASN. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai kejelasan nasib para honorer ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah, dan Irma pun mengungkapkan pihaknya juga akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

"Kami akan mempertanyakan itu dan mendorong Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Empat yang harus kita dorong. Kementerian tersebut harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa satu-satu, tentu akan kami fasilitasi juga," kata Irma dalam audiensi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).



Anggota Komisi IX Irma Suryani saat mengikuti audiensi.

Irma juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang di rekrut oleh Pemerintah Daerah tanpa menggunakan nomenklatur yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menengarai ada faktor janji-janji politik dibalik rekrutmen para honorer oleh Pemerintah Daerah.

Banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang direkrut oleh Pemerintah Daerah, justru karena berpolitik, untuk mendukung bupati, walikota, gubernur, nah begitu mendukung ya gajinya itu yang dibawah 500 ribu itu. Setelah masuk tidak ada pertanggungjawaban, maka tidak masuk legalitas mereka dalam BKN, karena yang mengangkat mereka bukan atas keputusan Menteri Dalam Negeri, diputuskan oleh Pemda semata," terang Irma.

Dalam audiensi ini juga diketahui, banyak tenaga honorer di daerah yang sistem penggajiannya tidak jelas. "Karena ternyata, gajinya dimasukkan ke dalam nomenklaturnya, belanja barang jasa, dari situ saja kami sudah tau pasti tidak masuk kedalam nomenklaturnya pemerintah Mendagri, harusnya belanja pegawai bukan barang dan jasa," kata Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

KAMI AKAN MEMPERTANYAKAN ITU DAN MENDORONG KEMENTERIAN PAN RB, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, DAN KEMENTERIAN KEUANGAN. EMPAT YANG HARUS KITA DORONG. KEMENTERIAN TERSEBUT HARUS DUDUK BERSAMA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH INI, TIDAK BISA SATU-SATU, TENTU AKAN KAMI FASILITASI JUGA.

Irma Suryani
Anggota Komisi IX

we/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kelas Cukai khusus Rokok UMKM



FOTO: DEPA/HA

Wakil Ketua Badan legislasi DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin RDPU.

Wakil Ketua Badan legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan adanya kelas cukai khusus bagi rokok produksi UMKM, mengingat munculnya produk-produk rokok dalam skala terbatas dan perhatian pemerintah untuk membina

dan memberdayakan UMKM. Hal ini dikatakannya usai Baleg DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan petani dan pedagang tembakau serta cengkeh dalam rangka penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan.

“Hari ini kategori cukai rokok ada 2, kategori I dan kategori II itu kan ada batasan jumlahnya. Nah itu mahal sekali bagi pelaku usaha kecil menengah. Sebaiknya memang ada klasifikasi lagi, diturunkan lagi. Misalnya kelas III kah, kelas IV kah sehingga itu ada klasifikasi. Kalau semua dipaksa untuk memenuhi cukai kategori I dan kategori II, itu berat bagi pelaku UMKM. itu pasti berat lah,” ujarnya usai RDPU Badan Legislasi DPR RI dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Tingginya tarif cukai membuat rokok produksi UMKM terseok-seok yang sering kali berujung pada pemasaran produk rokok tanpa pita cukai, sehingga diperlukan adanya aturan baru terkait tarif cukai untuk rokok produksi UMKM.

Politisi Fraksi PPP ini menyatakan bahwa sebetulnya tak ada niatan dari para pelaku UMKM rokok untuk mangkir dari kewajiban cukai. Tingginya tarif cukai, tambahannya, membuat mereka terseok-seok yang sering kali berujung pada pemasaran produk rokok tanpa pita cukai, sehingga diperlukan adanya aturan baru terkait tarif cukai untuk rokok produksi UMKM.

SEBETULNYA TAK ADA NIATAN DARI PARA PELAKU UMKM ROKOK UNTUK MANGKIR DARI KEWAJIBAN CUKAI. TINGGINYA TARIF CUKAI, TAMBAHNYA, MEMBUAT MEREKA TERSEOK-SEOK YANG SERING KALI BERUJUNG PADA PEMASARAN PRODUK ROKOK TANPA PITA CUKAI, SEHINGGA DIPERLUKAN ADANYA ATURAN BARU TERKAIT TARIF CUKAI UNTUK ROKOK PRODUKSI UMKM.

Achmad Baidowi
Wakil Ketua Badan legislasi DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Pariwisata Harus Libatkan Pelaku Pariwisata

Legislati DPR RI kembali menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada Rabu (22/5). Dalam forum tersebut, Anggota Baleg DPR RI I Nyoman Parta mengingatkan Komisi X agar dalam pembahasan RUU Kepariwisata dapat melibatkan pelaku pariwisata di Bali.

Mengingat, Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan di berbagai hasil seni dan budayanya. "Hasil komunikasi kami dengan pihak *stakeholder* di Bali khususnya, belum pernah diundang. Jadi kalau berbicara tentang pariwisata tentu saya berharap teman-teman *stakeholder* di Bali diundang untuk memberikan masukan dalam rangka memperkuat isi dan substansi dari undang-undang (pariwisata) yang mau direvisi ini," kata Nyoman



Anggota Baleg DPR RI I Nyoman Parta, saat mengikuti Rapat Panitia Kerja.

di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sementara itu, dalam

penyusunan RUU Kepariwisata tersebut Nyoman menekankan pentingnya isi Bab 9 Bagian Keempat dari Pasal 46 tentang Standardisasi. Ia menyebut, penerapan standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*) menjadi instrumen penting yang perlu diterapkan untuk menjaga wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman.

"Kemarin waktu kita mengalami dihadapkan pada Covid-19, Bapak/Ibu tahu bahwa pariwisata sangat terpukul, Cuma dengan penerapan penerapan standar CHSE jadi iklim *cleanlines, health, safety, and environment* itu memiliki dampak yang sangat positif menjaga dan mempercepat proses pulih," jelas Legislator Dapil Bali tersebut.

bia/rdn



HASIL KOMUNIKASI KAMI DENGAN PIHAK *STAKEHOLDER* DI BALI KHUSUSNYA, BELUM PERNAH DIUNDANG. JADI KALAU BERBICARA TENTANG *PARIWISATA* TENTU SAYA BERHARAP TEMAN-TEMAN *STAKEHOLDER* DI BALI DIUNDANG UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT ISI DAN SUBSTANSI DARI UNDANG-UNDANG (*PARIWISATA*) YANG MAU DIREVISI INI.

I Nyoman Parta

Anggota Baleg DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Rapat Koordinasi Terakhir Timwas Haji DPR

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat koordinasi terakhir untuk memastikan kesiapan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024. Dalam rapat yang berlangsung di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa Timwas siap mengawasi penyelenggaraan haji tahun 2024.

“Dengan pengalaman tahun lalu (2023), tahun (2024) ini kita akan mempersiapkan lebih baik lagi di semua titik-titik itu dan untuk catatan-catatan yang ada itu menjadi referensi untuk perbaikan-perbaikan. Karena jemaah kita banyak (sejumlah) 241.000 orang. Timwas ini akan bekerja maksimal untuk perbaikan-pebaikan,” ujar Indra, di kompleks DPR RI, Jakarta



FOTO: MUNAHA

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Pusat, Jakarta, Rabu (29/5).
Rapat tersebut bertujuan

memastikan program pengawasan Timwas selama di Tanah Suci berjalan optimal. Indra mengakui bahwa mobilitas Timwas akan menghadapi tantangan, terutama terkait sarana kesehatan, pemondokan, dan akomodasi lainnya. “Sarana logistik dan akomodasi selama di sana sudah siap. Kami memiliki catatan penyelenggaraan haji 2023 yang akan menjadi acuan,” ujarnya.

Indra menambahkan bahwa Timwas akan lebih cermat dalam menganalisis permasalahan pelaksanaan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi ke depan, dengan fokus khusus pada area seperti Arafah. “Dengan pengalaman tahun lalu, kita akan lebih cermat mengatur pergerakan Timwas agar evaluasi dapat berjalan baik, termasuk melihat maktab dan tenda di Arafah,” tuturnya.

DENGAN PENGALAMAN TAHUN LALU, KITA AKAN LEBIH CERMAT MENGATUR PERGERAKAN TIMWAS AGAR EVALUASI DAPAT BERJALAN BAIK, TERMASUK MELIHAT MAKTAB DAN TENDA DI ARAFAH.

Indra Iskandar

Sekretaris Jenderal DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





Komisi VII DPR RI
meninjau perusahaan
smelter nikel
yang belum lama
ini mengalami
insiden ledakan
dan mengakibatkan
sejumlah pegawai
meninggal di Kutai
Kartanegara,
Kalimantan Timur,
Rabu (29/5/2024).
FOTO:JK/AHA

